



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA GRESIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DULLOH
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 57210

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 449.781.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/90 m2 di BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/45 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah Seluas 189 m2 di BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 52.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/21 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 73.281.600

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 164.030.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 95.000
4. LAINNYA, FEDERAL SEPEDA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 95.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 140.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 275.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	621.586.600
III. HUTANG	Rp.	55.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	566.586.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.